



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Herawati

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

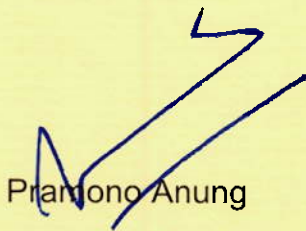
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : Lusiana Herawati
NIP : 196706131988032002
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sistem Perencanaan Tahunan	Membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12,5	36,46	67,92	100	100	Persen
				Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran						
Sasaran Relevan Lainnya										
2	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : $\leq 60 = \text{Rendah}$; $60 < \text{s.d } 70 = \text{cukup}$; $70 < \text{s.d } 90 = \text{Baik}$; $90 < \text{s.d } 100 = \text{Sangat Baik}$						
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dilindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum dilindaklanjuti	25	25	25	25	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

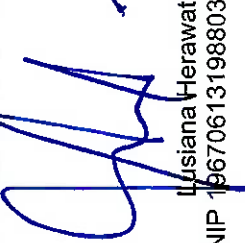
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2026

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100	RA1. Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 400 Objek Pajak Daerah	KK1.1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) Tahun 2026	T/O1.1.1. Dokumen Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) Tahun 2026	1 Dokumen	TW I
					KK1.2. Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 50 Objek Pajak Daerah	T/O1.2.1. Laporan Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 50 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW II
					KK1.3. Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 200 Objek Pajak Daerah	T/O1.3.1. Laporan Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 200 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW III
					KK1.4. Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 400 Objek Pajak Daerah	T/O1.4.1. Laporan Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap 400 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW IV
					KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 10 berita dan/atau artikel Triwulan 1	T/O2.1.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui 10 Berita dan/atau Artikel Triwulan 1	1 Laporan	TW I
					KK2.2. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 50 berita dan/atau artikel Triwulan 2	T/O2.2.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui 50 Berita dan/atau Artikel Triwulan 2	1 Laporan	TW II
					KK2.3. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 100 berita dan/atau artikel Triwulan 3	T/O2.3.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui 100 Berita dan/atau Artikel Triwulan 3	1 Laporan	TW III
					KK2.4. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 160 berita dan/atau artikel	T/O2.4.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui 160 Berita dan/atau Artikel	1 Laporan	TW IV
				RA2. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah sebanyak 160 Berita Melalui Media Berita dan/atau Artikel				

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Per Triwulan	Triwulan 4	Triwulan 4		
					KK3.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 1	T/O3.1.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 1	1 Laporan	TW I
					KK3.2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 2	T/O3.2.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 2	1 Laporan	TW II
					KK3.3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 3	T/O3.3.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 3	1 Laporan	TW III
					KK3.4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 4	T/O3.4.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 4	1 Laporan	TW IV
				RA4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran sebanyak 2.000 Objek Pajak Daerah Baru	KK4.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 360 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	T/O4.1.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 360 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW I
					KK4.2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 960 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	T/O4.2.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 960 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW II
					KK4.3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 1.680 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan	T/O4.3.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 1.680 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan	1 Laporan	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					Jasa Tertentu (PBJT)	Jasa Tertentu (PBJT)		
					KK4.4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 2.000 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	T/O4.4.1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 2.000 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW IV
					KK5.1. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 125 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O5.1.1. Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 125 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggaka	1 Laporan	TW I
					KK5.2. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 250 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O5.2.1. Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 250 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	1 Laporan	TW II
					KK5.3. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 375 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O5.3.1. Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 375 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	1 Laporan	TW III
					KK5.4. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 500 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O5.4.1. Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 500 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	1 Laporan	TW IV
					KK6.1. Tersusunnya Rencana Penilaian Individual (Valuation Plan) Tahun 2026	T/O6.1.1. Dokumen Rencana Penilaian Individual (Valuation Plan) Tahun 2026	1 Dokumen	TW I
					KK6.2. Terkumpulnya Data dan Proses Administrasi Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non	T/O6.2.1. Laporan Kegiatan Pengumpulan Data dan Proses Administrasi Penilaian Individual	1 Laporan	TW II
					RA5. Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 500 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan			
				RA6. Melaksanakan Penyelesaian Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) 350 Objek Pajak				

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					Standar (Valuation Plan) sebesar 50 Objek Pajak	Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) sebanyak 50 Objek Pajak		
					KK6.3. Terlaksananya Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) sebesar 100 Objek Pajak	T/O6.3.1. Laporan Kegiatan Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) sebanyak 100 Objek Pajak	1 Laporan	TW III
					KK6.4. Terlaksananya Penyelesaian Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) 350 Objek Pajak	T/O6.4.1. Laporan Kegiatan Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) sebanyak 350 Objek Pajak	1 Laporan	TW IV
					KK7.1. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta SmartTax tahun 2025 sebanyak 11.000 Data	T/O7.1.1. Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta SmartTax Tahun 2025 sebanyak 11.000 Data	1 Laporan	TW I
					KK7.2. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta SmartTax tahun 2026 sebanyak 7.000 Data	T/O7.2.1. Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta SmartTax Tahun 2026 sebanyak 7.000 Data	1 Laporan	TW II
					KK7.3. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta SmartTax tahun 2026 sebanyak 15.000 Data	T/O7.3.1. Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta SmartTax Tahun 2026 sebanyak 15.000 Data	1 Laporan	TW III
					KK7.4. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta SmartTax tahun 2026 sebanyak 20.000 Data	T/O7.4.1. Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta SmartTax Tahun 2026 sebanyak 20.000 Data	1 Laporan	TW IV
					KK8.1. Terlaksananya Implementasi ETRAPT terhadap	T/O8.1.1. Laporan Kegiatan	1 Laporan	TW I
					RA7. Melaksanakan Pemutakhiran Data Hasil Jakarta SmartTax Tahun 2025 sebanyak 11.000 Data dan Tahun 2026 sebanyak 20.000 Data			
					RA8. Melaksanakan Implementasi ETRAPT terhadap 1.000 Objek Pajak Daerah			

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA9. Melaksanakan Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Per Triwulan	100 Objek Pajak Daerah	Implementasi ETRAPT terhadap 100 Objek Pajak Daerah		
					KK8.2. Terlaksananya Implementasi ETRAPT terhadap 300 Objek Pajak Daerah	T/O8.2.1. Laporan Kegiatan Implementasi ETRAPT terhadap 300 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW II
					KK8.3. Terlaksananya Implementasi ETRAPT terhadap 500 Objek Pajak Daerah	T/O8.3.1. Laporan Kegiatan Implementasi ETRAPT terhadap 500 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW III
					KK8.4. Terlaksananya Implementasi ETRAPT terhadap 1.000 Objek Pajak Daerah	T/O8.4.1. Laporan Kegiatan Implementasi ETRAPT terhadap 1.000 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW IV
					KK9.1. Terlaksananya Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 1	T/O9.1.1. Laporan Hasil Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 1	1 Laporan	TW I
					KK9.2. Terlaksananya Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 2	T/O9.2.1. Laporan Hasil Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 2	1 Laporan	TW II
					KK9.3. Terlaksananya Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 3	T/O9.3.1. Laporan Hasil Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 3	1 Laporan	TW III
					KK9.4. Terlaksananya Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu	T/O9.4.1. Laporan Hasil Monitoring Atas Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (Bpk)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (Bpk)	100	RA10. Mengidentifikasi isu strategis dan persepsi publik terhadap Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	(dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 4	(dengan menggunakan ETRAPT) Triwulan 4		
					KK10.1. Ditetapkannya Program Strategis oleh seluruh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat	T/O10.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I
					KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O10.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW IV
						T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
2	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddi.jakarta.go.id RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri,	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddi.jakarta.go.id KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa	T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV
						T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	1 data	TW I
						T/O2.1.1. data AKB target bulanan pada sistem sipkddi.jakarta.go.id	1 data	TW I
						T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV
						T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa	80 Persen	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SP.U) paling sedikit 80%	Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SP.U)		

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Luviana Herawati
NIP 196706131988032002